



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 80 /KEP/HK/2017**

TENTANG

**TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERINGATAN
BULAN BHAKTI GOTONG-ROYONG MASYARAKAT KE-14,
HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KE 45, HARI KELUARGA KE-24 DAN GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA KE-3
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Hari Keluarga (HARGA) mempunyai arti penting bagi setiap keluarga di Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga perayaannya pada Tahun 2017 dipadukan dengan Peringatan Bulan Bhakti Gotong-Royong Masyarakat (BB-GRM), Hari Kesatuan Gerak (HKG) Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) dengan fokus pada kegiatan dari, oleh dan untuk keluarga serta masyarakat yang didukung oleh Pemerintah dan Swasta;
 - b. bahwa dengan peringatan ke empat hari besar tersebut pada tahun 2017 ini, diharapkan setiap keluarga akan tergerak untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan keluarganya serta peduli terhadap keluarga yang lain terutama keluarga yang rentan;
 - c. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan peringatan Bulan Bhakti Gotong-royong Masyarakat (BB-GRM) ke-14, Hari Kesatuan Gerak (HKG) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ke-45, Hari Keluarga (HARGA) ke-24 dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) ke-3, perlu dibentuk Tim Koordinasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Peringatan Bulan Bhakti Gotong-royong Masyarakat ke 14, Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaaan dan Kesejahteraan Keluarga ke-45, Hari Keluarga ke-24 dan Gelar Teknologi Tepat Guna ke-3 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- Memperhatikan** : Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 36/KEP/HK/2013 tentang Penetapan Lokasi Pencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BB-GRM), Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK dan Hari Keluarga (HARGA) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN :

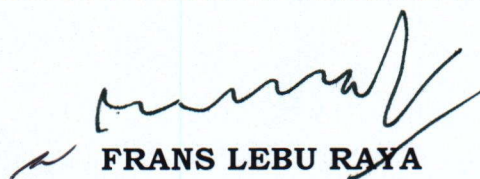
Menetapkan :

- KESATU** : Tim Koordinasi Penyelenggaraan Peringatan Bulan Bhakti Gotong-royong Masyarakat ke 14, Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ke-45, Hari Keluarga ke-24 dan Gelar Teknologi Tepat Guna ke-3 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Pelindung, Pembina dan Pengarah dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mempersiapkan dan melaksanakan rangkaian kegiatan Peringatan Bulan Bhakti Gotong-Royong Masyarakat (BB-GRM) ke-14, Hari Kesatuan Gerak (HKG) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ke-45, Hari Keluarga (HARGA) ke-24 dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) ke-3 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing Dinas/Instansi terkait baik Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 MARET 2017

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Jakarta;
5. Kepala BKKBN Pusat di Jakarta;
6. Bupati/Walikota se-Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
7. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
8. Ketua TP-PKK Pusat di Jakarta;
9. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kadis PMD Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
12. Ketua TP-PKK Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
13. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 80 /KEP/HK/2017
TANGGAL : 21 MARET 2017

PELINDUNG, PEMBINA DAN PENGARAH
DARI PENYELENGGARAAN PERINGATAN BULAN BHAKTI GOTONG-ROYONG
MASYARAKAT (BB-GRM) KE-14, HARI KESATUAN GERAK (HKG) PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KE-45, HARI KELUARGA (HARGA) KE-24 DAN
GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) KE-3
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT	Pengarah
5.	Kepala Bappeda Provinsi NTT	Pengarah

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 80 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 21 Maret 2017**

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERINGATAN BULAN BHAKTI
GOTONG-ROYONG MASYARAKAT (BB-GRM) KE-14, HARI KESATUAN GERAK (HKG)
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KE-45, HARI KELUARGA
(HARGA) KE-24 DAN GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) KE-3
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Ketua TP-PKK Provinsi NTT	Ketua Umum	Bertanggung jawab terhadap Peringatan BB-GRM ke-14, HKG-PKK ke-45, HARGA ke-24 dan Gelar TTG ke-3 Tingkat Provinsi NTT Tahun 2017.
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Ketua I	a. bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan Peringatan BB-GRM ke-14, HKG-PKK ke-45, HARGA ke-24 dan Gelar TTG ke-3 Tingkat Provinsi NTT Tahun 2017 antar bidang, sektor dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan di lokasi; dan b. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan BB-GRM ke-14, HKG-PKK ke-45, HARGA ke-24 dan Gelar TTG ke-3 Tingkat Provinsi NTT Tahun 2017.
3.	Kepala PBKKBN Provinsi NTT	Ketua II	Bertanggungjawab untuk mengkoordinasi Pelaksanaan Peringatan BB-GRM ke-14, HKG-PKK ke-45, HARGA ke-24 dan Gelar TTG ke-3 Tingkat Provinsi NTT Tahun 2017.
4.	Wakil Ketua TP. PKK Provinsi NTT	Ketua Pelaksana	Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lokasi peringatan.

1	2	3	4
5.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Sekretaris I	Mempersiapkan dan memfasilitasi penyelesaian administrasi Pelaksanaan Peringatan BB-GRM ke-14, HKG-PKK ke-45, HARGA ke-24 dan Gelar TTG ke-3 Tingkat Provinsi NTT Tahun 2017.
6.	Kepala Bidang Pengembangan Potensi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Sekretaris II	Sda
7.	Sekretaris TP-PKK Provinsi NTT	Sekretaris III	Sda
8.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Wakil Sekretaris I	Membantu Sekretaris I dalam penyelesaian hal-hal teknis berkaitan dengan proses penyelesaian administrasi dan hal-hal teknis lainnya.
9.	Kepala Bidang ADPIN pada BKKBN Provinsi NTT	Wakil Sekretaris II	Membantu Sekretaris II dalam penyelesaian hal-hal teknis berkaitan dengan proses penyelesaian administrasi dan hal-hal teknis lainnya.
10.	Kepala Seksi Pemberdayaan Adat Pengembangan Sosial Budaya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Wakil Sekretaris III	Membantu Sekretaris III dalam penyelesaian hal-hal teknis berkaitan dengan proses penyelesaian administrasi dan hal-hal teknis lainnya.
11.	Kepala Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Wakil Sekretaris IV	Membantu Sekretaris I, II dan III dalam penyelesaian hal-hal teknis berkaitan dengan proses penyelesaian administrasi dan hal-hal teknis lainnya.
A.	BIDANG KEMASYARAKATAN		
1.	Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Ketua	a. melakukan sosialisasi dan persiapan Pelaksanaan Peringatan BB-GRM ke-14, HKG-PKK ke-45, HARGA ke-24 dan Gelar TTG ke-3 Tingkat Provinsi NTT Tahun 2017;
2.	Kepala Kepolisian Daerah NTT	Anggota	

1	2	3	4
3.	Kepala Kejaksaan Tinggi NTT	Anggota	b. memfasilitasi Kabupaten dan Kota dalam menentukan bidang-bidang kegiatan yang menjadi prioritas yang dapat dilaksanakan secara bergotong royong oleh masyarakat;
4.	Komandan Resort Militer 161 Wirasakti Kupang	Anggota	
5.	Kasat Pol. PP Provinsi NTT	Anggota	
6.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	c. memfasilitasi Kabupaten dan Kota dalam menyusun jadwal Pelaksanaan Peringatan BB-GRM ke-14, HKG-PKK ke-45, HARGA ke-24 dan Gelar TTG ke-3 Tingkat Provinsi NTT Tahun 2017;
7.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	d. melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Desa dan Kelurahan selama berlangsungnya Pelaksanaan Peringatan BB-GRM ke-14, HKG-PKK ke-45, HARGA ke-24 dan Gelar TTG ke-3 Tingkat Provinsi NTT Tahun 2017 agar masyarakat termotivasi dan meningkatkan kepedulian dengan berpartisipasi secara aktif dalam semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan; dan
9.	Ketua Pokja I TP-PKK Provinsi NTT	Anggota	

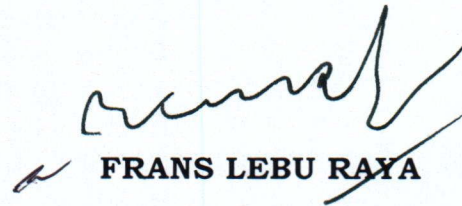
1	2	3	4
B.	BIDANG EKONOMI		
1.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT	Ketua	<p>a. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait, Kabupaten dan Kota untuk mensinergikan berbagai program sektor masuk Desa dan Kelurahan;</p> <p>b. melakukan sosialisasi dan persiapan Pelaksanaan Peringatan BB-GRM ke-14, HKG-PKK ke-45, HARGA ke-24 dan Gelar TTG ke-3 Tingkat Provinsi NTT Tahun 2017;</p> <p>c. memfasilitasi Kabupaten dan Kota dalam menentukan bidang-bidang kegiatan yang menjadi prioritas yang dapat dilaksanakan secara bergotong-royong oleh masyarakat;</p> <p>d. memfasilitasi Kabupaten/ Kota dalam penyusunan jadwal Pelaksanaan Peringatan BB-GRM ke-14, HKG-PKK ke-45, HARGA ke-24 dan Gelar TTG ke-3 Tingkat Provinsi NTT Tahun 2017; dan</p> <p>e. melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Desa dan Kelurahan selama berlangsungnya pelaksanaan Peringatan BB-GRM ke-14, HKG-PKK ke-45, HARGA ke-24 dan Gelar TTG ke-3 Tingkat Provinsi NTT Tahun 2017, agar masyarakat termotivasi untuk meningkatkan kepeduliannya dengan berpartisipasi secara aktif dalam semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.</p>
2.	Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT	Anggota	
3.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	
4.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
5.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	
6.	Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTT		
8.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
9.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	
10.	Ketua Pokja II TP-PKK Provinsi NTT	Anggota	

1	2	3	4
C. BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN AGAMA			
1.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT	Ketua	<p>a. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait Kabupaten dan Kota untuk mensinergikan berbagai program sektor masuk Desa dan Kelurahan;</p> <p>b. melakukan sosialisasi dan persiapan Pelaksanaan Peringatan BB-GRM ke-14, HKG-PKK ke-45, HARGA ke-24 dan Gelar TTG ke-3 Tingkat Provinsi NTT Tahun 2017;</p> <p>c. memfasilitasi Kabupaten dan Kota dalam menentukan bidang-bidang kegiatan yang menjadi prioritas yang dapat dilaksanakan secara bergotong-royong oleh masyarakat;</p> <p>d. memfasilitasi Kabupaten dan Kota dalam penyusunan jadwal kegiatan Pelaksanaan Peringatan BB-GRM ke-14, HKG-PKK ke-45, HARGA ke-24 dan Gelar TTG ke-3 Tingkat Provinsi NTT Tahun 2017 Tingkat Desa dan Kelurahan;</p> <p>e. melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Desa dan Kelurahan selama berlangsungnya BB-GRM ke-14, HKG-PKK ke-45, HARGA ke-24 dan Gelar TTG ke-3 Tingkat Provinsi NTT Tahun 2017 agar masyarakat termotivasi untuk meningkatkan kepeduliannya dengan berpartisipasi secara aktif dalam semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan; dan</p>
2.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	
3.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
4.	Kepala Subbid Hubungan Antar Lembaga dan Lini Lapangan pada PBKKBN Provinsi NTT	Anggota	
5.	Kepala - Biro Kesra Setda Provinsi NTT	Anggota	
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Setda Provinsi NTT	Anggota	
7.	Ketua Pokja IV TP.PKK Provinsi NTT	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	
9.	Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTT	Anggota	
11.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	

1	2	3	4
12.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	f. melakukan evaluasi dan pengendalian Pelaksanaan Peringatan BB-GRM ke-14, HKG-PKK ke-45, HARGA ke-24 dan Gelar TTG ke-3 Tingkat Provinsi NTT Tahun 2017.
13.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	
D. BIDANG LINGKUNGAN			
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait Kabupaten dan Kota untuk mensinergikan berbagai program sektor masuk Desa dan Kelurahan; b. melakukan sosialisasi dan persiapan Pelaksanaan Peringatan BB-GRM ke-14, HKG-PKK ke-45, HARGA ke-24 dan Gelar TTG ke-3 Tingkat Provinsi NTT Tahun 2017; c. memfasilitasi kabupaten dan kota dalam menentukan bidang-bidang kegiatan yang menjadi prioritas yang dapat dilaksanakan secara bergotong-royong oleh masyarakat; d. melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Desa dan Kelurahan selama berlangsungnya Pelaksanaan Peringatan BB-GRM ke-14, HKG-PKK ke-45, HARGA ke-24 dan Gelar TTG ke-3 Tingkat Provinsi NTT Tahun 2017 agar masyarakat termotivasi untuk meningkatkan kepeduliannya dengan berpartisipasi secara aktif dalam semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan; dan
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	
3.	Ketua Pokja III TP-PKK Provinsi NTT	Anggota	

1	2	3	4
4.	Kepala Bidang Pengembangan Potensi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	e. melakukan evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Peringatan BB-GRM ke-14, HKG-PKK ke-45, HARGA ke-24 dan Gelar TTG ke-3 Tingkat Provinsi NTT Tahun 2017.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA